

ASPEK HUKUM MENUJU LEMBAGA PERPAJAKAN YANG TRANSPARAN DAN KUAT ¹

Oleh : Noor Rahardjo, S.H, M.Hum. ²

PENDAHULUAN

Rumusan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan tersebut memberi arti bahwa kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia adalah hukum dan hukum digunakan dalam mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat.

Apabila dikaitkan dengan ruang lingkup tugas-tugas negara maka secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987 : 52). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV sebagai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Sila Kelima dari Pancasila, dilihat dari perspektif filsafat hukum artinya adalah : "***Lex Populi Suprema Lex***" (**Kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi**). Begitu pula dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, mengharuskan pemerintah/negara untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

¹ Disampaikan dalam Seminar Efektivitas Lembaga Pengelola Pajak, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Sabtu. 24 Oktober 2003

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Sebagai konsekuensi negara hukum yang mengutamakan kesejahteraan rakyat maka diperlukan sumber dana dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Oleh karena itu negara mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain berupa: hak memungut pajak, hak mencetak uang, hak mengadakan pinjaman, dll. Sedangkan kewajiban-kewajiban negara antara lain berupa kewajiban menjalankan tugas negara untuk kesejahteraan rakyat, misalnya: pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dll. Demikian pula kewajiban negara dalam membayar atas hak-hak tagihan yang datang dari pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan negara, misalnya: konsultan, kontraktor, supplier, dll.

Khusus dalam kaitan hak-hak negara di atas, pemerintah terlebih dahulu mengajukan RUU APBN kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi UU APBN.

PERMASALAHAN

Berkaitan dengan topik seminar, **Efektivitas Lembaga Pengelola Pajak**, maupun judul yang diajukan Panitia kepada Pembicara, yaitu : **Menuju Lembaga Perpajakan Yang Transparan Dan Kuat**, dan di dalam TOR juga disebutkan bahwa sehubungan dengan kondisi krisis ekonomi Indonesia yang belum berakhir, serta kemauan politik pemerintah untuk memutus dana dari *International Monetary Fund (IMF)*, mengandung implikasi bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi kelembagaan perpajakan khususnya dan keuangan pada umumnya negara. Restrukturisasi dan reformasi diperlukan agar tercapai (1) *Clean Government* dan (2) optimalisasi keuangan negara. Berkaitan dengan itu semua, maka dalam makalah ini kiranya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

- 1). Apakah memang diperlukan restrukturisasi dan reformasi lembaga perpajakan khususnya dan keuangan (negara) pada umumnya ?